

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebutuhan manusia yang sangat banyak dipenuhi dengan membuat permintaan terhadap barang dan jasa. Dengan banyaknya pilihan yang tersedia (*available*) dan terjangkau (*affordable*), konsumen membuat keputusan memilih salah satu yang lebih disukai. Jika sekumpulan barang y bisa saja dibeli individu sesuai dengan anggarannya namun ternyata ia membeli barang lain x maka dianggap ia mengungkapkan preferensinya pada x daripada y . Kondisi yang konsisten mengakibatkan ia tidak dapat memilih barang y atas x karena melanggar aksioma lemah preferensi terungkap (*weak axiom of revealed preference*) atau WARP (Samuelson, 1948). Keputusan memilih dibuat dengan melakukan evaluasi komparatif terhadap daftar pilihan dengan cara mengurutkan (*meranking*) dan memilih salah satu yang lebih disukai (Davis, 2007; Druckman dan Lupia, 2000). Keputusan ini merupakan pilihan terbaik yang dibuat berdasarkan pertimbangan biaya dan manfaat yang didapatkan atas pilihan tersebut (Hoch dan Loewenstein, 1991). Artinya apabila ada barang dan jasa yang lebih disukai, maka tidak mungkin dipilih barang dan jasa yang lain. Oleh karena itu permintaan individu sekaligus mengandung informasi mengenai preferensinya (Samuelson, 1938). Dengan demikian observasi yang dilakukan terhadap permintaan individu sesungguhnya mencerminkan preferensi individu itu sendiri. Sebagaimana diasumsikan dalam teori ekonomi, bahwa manusia adalah makhluk rasional yang membuat pilihan berdasarkan keputusan yang konsisten, maka pilihan individu adalah rasional apabila preferensi diwujudkan dalam permintaan (Davis, 2007).

Namun faktanya tidak semua pilihan individu konsisten dengan preferensinya. Kebanyakan individu membuat permintaan yang tidak sejalan dengan keinginan yang lebih disukai namun kemudian pilihan itu disesali setelah terjadi. Ada kekuatan rasional dan emosional yang berperang dalam diri individu dan berpengaruh terhadap pengendalian dirinya. Sarfin (2011) mendefinisikan rasionalitas sebagai cara individu membuat keputusan dengan menggunakan data observasi kuantitatif untuk menentukan rencana yang paling cocok tanpa melibatkan emosi, takhyul, atau kejadian anekdot untuk mencapai hasil yang

terbaik. Akibatnya muncul konflik batin antara keinginan untuk membeli dan upaya untuk mengendalikan perilaku sendiri. Apabila kekuatan emosional lebih dominan maka permintaan yang dibuat menjadi pilihan yang tidak rasional karena mengabaikan pertimbangan manfaat dan biaya sekarang dan masa depan sehingga individu jatuh pada karakter hedonis (Hirschman dan Holbrook, 1982). Paradigma yang digunakan untuk menggambarkan perilaku ini adalah teori perilaku konsumen dengan menggunakan terminologi *trade-off*, atribut, pilihan, dan aturan keputusan untuk mengungkapkan pandangan tentang perilaku pengambilan keputusan.

Perilaku individu yang mengalami konflik saat menentukan pilihan tidak hanya berlaku saat mengonsumsi barang dan jasa, namun juga berlaku ketika mengonsumsi barang non pasar, yaitu pemimpin. Di negara-negara yang menganut azas demokrasi, pemimpin dipilih oleh rakyat melalui kompetisi pemilihan umum. Kesempatan ini dinanti-nanti oleh rakyat yang ingin mengganti pemimpinnya. Ketika rakyat tidak menginginkan lagi politisi yang berkuasa, maka pemilihan umum memberikan kesempatan untuk mengeluarkannya dari kekuasaan (Barro, 1973 dan Ferejohn, 1986). Karena itu pemilihan umum merupakan elemen kunci demokrasi (Branco, 2011) yang merupakan suatu sistem dimana pemilih menentukan pilihan pada salah satu kandidat untuk membentuk pemerintahan dan menjalankan programnya (McDonald *et al*, 2004).

Pemilu memberikan kontribusi mendasar bagi pemerintahan yang demokratis, karena pemerintahan dibentuk melalui keputusan politik yang dibuat langsung oleh seluruh warga negara yang memenuhi syarat dan harus dilakukan melalui perwakilan, yaitu pemerintah (Alvarez dan Hall, 2006). Begitu pentingnya pemilihan umum, hingga Abraham Lincoln dalam pidatonya yang dikutip oleh Udeh dan Basse (2018) mengingatkan bahwa "pemerintah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat". Pemerintah dari rakyat mencerminkan kepemimpinan politik dalam demokrasi harus menjadi pilihan kolektif. Pemerintah oleh rakyat menunjukkan tidak ada yang mendapatkan jabatan politik kecuali melalui pemilihan. Dan pemerintah untuk rakyat menunjukkan penduduk harus menjadi keterlibatan prioritas pemerintah. Karena negara adalah milik rakyat yang memberi kehidupan kepadanya, maka menjadi kewajiban bagi negara untuk

melayani rakyat. Oleh karena itu dalam negara demokrasi pemerintah adalah wakil karena dipilih dalam pemilihan umum (Przeworski, Stokes, Manin, 1999).

Preferensi masyarakat dalam pemilihan umum didasarkan pada karakter yang terkait dengan kepribadian pemimpin (Wamilia, Munandar, dan Sumarwan, 2019; dan Przeworski, 2014). Karakter pemimpin harus dimiliki oleh kandidat karena berhubungan positif dengan hasil individu, tim, dan organisasi (Byrne, Crossan, dan Seijts, 2017). Karakter kepemimpinan dapat mengangkat visi individu menjadi lebih tinggi dan meningkatkan kinerja kepada standar yang lebih tinggi (Baker, 2019). Nilai-nilai yang dimiliki setiap pemimpin membedakan mereka dengan pemimpin lainnya (Russel, 2001). Oleh karena itu seorang pemimpin harus memiliki sekumpulan karakter yang menjadi ciri-ciri kepribadian seorang pemimpin (Gandolfi dan Stone, 2018; Loomes, Orr, dan Sugden, 2009).

Karakter pemimpin yang lebih disukai masyarakat menurut survey yang dilakukan oleh Ramadhan (2018) adalah jujur dan amanah, tegas dan konsisten, adil, cerdas, merakyat, peduli, dan sederhana. Hasil penelitian dengan maksud yang sama juga dilakukan juga Chris (2014) dengan menambahkan karakter peduli, bijaksana, bermoral, panutan, dan integritas. Selanjutnya Poltracking (2018) melengkapi dengan berwibawa, religius, berpengalaman, berprestasi, kreatif/ inovatif, santun, menarik/ tampan/cantik, dan faktor usia (muda/matang). Preferensi pemilih terhadap karakter yang diharapkan dari pemimpin tidak sama. Pemilih dapat menyukai satu karakter saja atau mungkin beberapa karakter sekaligus. Namun apabila diurutkan beberapa karakter yang lebih disukai, maka akan ditemukan urutan yang berbeda pada tiap pemilih. Urutan tersebut menunjukkan peringkat atau ranking karakter yang lebih disukai dan menjadi preferensi bagi pemilih yang diwujudkan dalam permintaan terhadap kandidat yang memiliki karakter tersebut. Kontradiksi atau pilihan yang berubah-ubah terjadi apabila preferensi pemilih tidak diwujudkan dalam permintaan terhadap kandidat yang memiliki karakter tersebut. Kondisi ini mengakibatkan keputusan tidak konsisten sehingga pilihan menjadi tidak rasional. Diantara sekumpulan karakter tersebut, menurut Koo (1963) tidak mungkin seluruh pemilih menghasilkan keputusan yang semuanya rasional atau semuanya tidak rasional. Dalam sebagian besar kasus, perilaku pemilih biasanya berada di antara dua kutub

yang diamati, yaitu berada di tengah-tengah di antara perilaku yang rasional dan tidak rasional, yang disebut abu-abu.

Namun menurut Staedler dan Castrillo (1991) karakter merupakan informasi yang tidak dipublikasikan dan bersifat pribadi yang hanya diketahui oleh kandidat. Meskipun Rhodes, Brundrett, dan Nevill (2008) menjelaskan bahwa bakat kepemimpinan akan terlihat jika individu memiliki karakteristik seperti memiliki inisiatif, memiliki visi, menunjukkan rasa percaya diri, memiliki kompetensi, mampu berkomunikasi dengan baik, pekerja keras, berpengalaman, dan profesional, namun tetap merupakan hal yang sulit untuk mengidentifikasi karakter pemimpin dalam diri individu. Ditambah lagi dengan derasnya informasi persuasif dari kelompok-kelompok yang berkompetisi menimbulkan ambivalensi saat membuat keputusan (Lavine, 2001). Pesatnya perkembangan teknologi komunikasi dan informasi mengakibatkan informasi dengan mudah didapatkan dari berbagai sumber namun sulit untuk dibuktikan kebenarannya (Yaghi, 2017 dan Akin, 1971). Akibatnya dihasilkan keputusan asal-asalan berdasarkan informasi yang didapatkan dari media maupun melalui jajak pendapat yang dilakukan oleh lembaga-lembaga survey yang dibayar untuk kepentingan kandidat (McKelvey dan Ordeshook, 1985). Disamping itu karena pemilih tidak memiliki pengetahuan mengenai utilitas maksimal yang diharapkan dari kandidat, maka media informasi juga berperan dalam membangun persepsi tentang kandidat (Lee dan Mih, 2019, Yang dan Lester, 2008). Karena itu pertimbangan individu dalam membuat keputusan dipengaruhi juga oleh cara individu mendapatkan informasi (Loke, 1985).

Dengan informasi yang tidak lengkap, pemilih tidak mengetahui apakah kandidat yang dipilih dan tugas yang diserahkan dapat dilakukan secara tepat (Alvarez dan Hall, 2006). Pemilih tidak hanya tidak memiliki informasi tentang posisi kebijakan yang koheren, proses penalaran pemilih juga sangat bias dan tidak rasional (Achen dan Bartels, 2004). Gagasan dan pertimbangan mengenai kandidat hanya sebagian yang diketahui pemilih, sehingga keputusan hanya bergantung pada valensi dan ekstremitas saat menentukan keputusan (Zaller dan Feldman, 1992). Kondisi ini dimanfaatkan kandidat dengan melakukan tindakan-tindakan yang menambah perolehan suara. Diantaranya adalah meningkatkan

pengeluaran kampanye yang digunakan untuk membeli suara (Janku dan Libich, 2019). Akibatnya terjadi perubahan preferensi politik pemilih sebagaimana terjadi di Amerika, dari partai republik menjadi partai demokrat, dan dari pemilih aktif menjadi partisan yang terjadi pada kelompok sosial ekonomi rendah (Fowler dan Margolis, 2014).

Perubahan preferensi ini disebabkan karena dua hal. Pertama, dalam mengevaluasi kinerja, pemilih mengandalkan peristiwa yang lebih baru dari keseluruhan masa kerja kandidat (Achen dan Bartels, 2004; Bartels dan Zaller, 2001; dan Erickson, 1989). Pada akhir masa jabatannya, kandidat melakukan kegiatan-kegiatan yang *visible* dan *observable* dengan tujuan untuk memberikan kesan tentang kompetensi dan kontribusi kandidat. Kedua, pemilih dipengaruhi oleh faktor dan peristiwa yang tidak relevan, terombang-ambing oleh retorika, pembingkaihan (*framing*), dan periklanan. Apalagi saat masa kampanye, kandidat memberikan janji-janji yang mempengaruhi keyakinan pemilih tentang seberapa besar keinginan mereka untuk berkontribusi pada publik (Born, Eck, Johannesson, 2017). Akibatnya timbul keraguan dalam diri pemilih sehingga perilaku terhadap pilihan menjadi tidak konsisten dan menghasilkan pilihan yang tidak rasional (Tred, Sher, dan McKenzie, 2015; Bandyopadhyay dan Sengupta, 1991; Kivetz dan Simonson, 2000).

Pilihan yang tidak rasional diawali dengan keputusan yang tidak konsisten atas beberapa pilihan yang tersedia dan terjangkau. Varian (2012) mengemukakan bahwa asumsi transitif dalam teori preferensi digunakan untuk mengukur konsistensi individu atas pilihan yang dibuat. Makowski dan Piotrowski (2011) serta Hughes (1980) mengilustrasikan asumsi transitif melalui sebuah pemisalan yaitu jika *A* lebih disukai dari *B* dan *B* lebih disukai dari *C*, maka *A* lebih disukai dari *C*. Apabila *C* lebih disukai dari *A* sehingga *A* tidak menjadi pilihan terbaik, berarti terjadi pelanggaran asumsi transitif yang disebut intransitif. Muller dan McKenzie (2011) menyebut intransitif sebagai preferensi random, yaitu preferensi yang tidak konsisten dimana keputusan yang dihasilkan tidak mencerminkan preferensi sesungguhnya dari pilihan yang diobservasi. Meskipun demikian, Yang dan Lester (2008) berpendapat bahwa pilihan yang tidak rasional bukan berarti kacau (*chaos*) tapi pilihan yang dibuat karena berbagai alasan, misalnya

pengambil keputusan memiliki gangguan psikiatri, ketergantungan obat, kecerdasan rendah, berasal dari kelas sosial yang rendah, anak-anak dan remaja, manula, bahkan dalam keadaan pengobatan medis.

Fenomena preferensi random ini diamati pada pemilihan presiden yang berlangsung pada tahun 2019 dan berlokasi di Kota Padang Provinsi Sumatera Barat. Kota ini merupakan satu-satunya daerah pemilihan di Provinsi Sumatera Barat yang memiliki keragaman pilihan yang cukup tinggi menurut sistem perhitungan suara KPU-RI. Meskipun secara keseluruhan persentase pemenang pilpres di Kota Padang mencapai 86,5 persen, namun pada beberapa keurahan terdapat pilihan yang heterogen sehingga rasio pilihan tidak lebar. Dengan pilihan yang heterogen lebih mudah mendapatkan sampel dalam jumlah yang seimbang sebagai syarat untuk memenuhi penarikan sampel secara *purposive*. Selain itu Kota Padang merupakan pusat pemerintahan dan perdagangan di Provinsi Sumatera Barat yang memiliki variasi dalam berbagai parameter seperti jenis pekerjaan, pendidikan, dan pendapatan sehingga dapat memenuhi informasi yang diharapkan dalam penelitian.

Menurut hasil perolehan suara diketahui bahwa beberapa provinsi di Pulau Sumatera memperoleh suara terbanyak untuk kandidat 01 seperti Provinsi Bangka Belitung, Provinsi Lampung, Provinsi Kepulauan Riau, dan Provinsi Sumatera Utara. Sementara provinsi lainnya yaitu Provinsi Bengkulu, Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi DI Aceh, dan Provinsi Riau mendapatkan suara terbanyak untuk kandidat 02 (Situng KPU, 2019). Diantara enam provinsi yang mendominasi pilihan pada kandidat 02, Provinsi Sumatera Barat memiliki persentase paling tinggi yaitu sebesar 85,92 persen, sedangkan Provinsi DI Aceh 85,59 persen, Provinsi Riau 61,27 persen, Provinsi Sumatera Selatan 59,7 persen, Provinsi Jambi 58,32 persen, dan Provinsi Bengkulu 50,11 persen. Bahkan jika dibandingkan dengan Provinsi Jawa Barat yang merupakan lumbung suara kandidat 02 dengan persentase 59,83 persen, Provinsi Sumatera Barat tetap paling dominan. Apabila mengikuti pendapat Samuelson (1948) yang mengemukakan bahwa permintaan mengandung informasi tentang preferensi, maka berarti pilihan masyarakat di Provinsi Sumatera Barat mengungkapkan preferensi mereka di daerah tersebut, yaitu lebih

menyukai kandidat 02 karena karakter pemimpin yang lebih disukai dianggap terdapat pada kandidat 02.

Persoalannya adalah apakah preferensi masyarakat terhadap karakter pemimpin merupakan pilihan yang konsisten dan apakah permintaan yang diobservasi terhadap kandidat benar-benar mengungkapkan preferensinya? Untuk mengetahui hal ini dilakukan penelitian dengan judul **Preferensi Masyarakat Kota Padang terhadap Karakter Pemimpin pada Pemilihan Presiden tahun 2019**. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan apakah preferensi masyarakat di Kota Padang dihasilkan dari pilihan yang konsisten dan apakah pilihan masyarakat terhadap kandidat memang mengungkapkan preferensinya? Preferensi yang ingin diungkapkan adalah karakter pemimpin yang terdapat pada kandidat yang memiliki karakter tersebut sebagaimana dikemukakan oleh Wamilia, Munandar, dan Sumarwan (2019), Przeworski (2014), Byrne, Crossan, dan Seijts (2017), Baker (2019), (Russell, 2001), Gandolfi dan Stone (2018), dan Loomes, Orr, dan Sugden (2009).

Teori yang digunakan adalah teori preferensi terungkap (*revealed preference*) yang dikemukakan oleh Samuelson pada tahun 1948. Ia menjelaskan bahwa preferensi individu dapat diungkapkan dengan mengobservasi pilihan terhadap barang/jasa. Pilihan tersebut tidak mungkin berbeda dengan preferensinya karena telah dilakukan berbagai pertimbangan oleh individu. Sedangkan jika menggunakan teori preferensi dinyatakan (*stated preference*) sebagaimana dijelaskan oleh Brown (2003), biasanya individu menjawab pertanyaan dengan asal-asalan atau enggan karena curiga dengan pertanyaan tersebut. Akibatnya peneliti tidak percaya pada kesediaan individu dan meragukan kemampuan menjawab dengan jujur dan hati-hati (Kroes dan Sheldon, 1988). Karena itu mereka menyatakan bahwa teori preferensi terungkap dapat diandalkan untuk menilai barang non pasar (*non market goods*) karena memiliki kemampuan penilaian secara natural.

Penelitian dengan menggunakan pendekatan preferensi terungkap telah dilakukan oleh peneliti lain diantaranya Shree dan Nagabhushanam (2018) yang menemukan perubahan preferensi konsumen akibat adanya gangguan teknologi. Kemudian Oke, Kamolshotiros, Popoola, Ajagbe, dan Olujobi (2016) menguji

preferensi masyarakat terhadap minuman kesehatan. Selanjutnya Anojan dan Subaskaran (2015) mengamati preferensi konsumen terhadap minuman soft drinks. Berikutnya Kahn (1995) meranking kualitas hidup di kota sedangkan Landsburg (1981) menguji perubahan selera sepanjang waktu. Penelitian tersebut hanya menganalisis perilaku konsumen dalam melakukan konsumsi, menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi preferensi konsumen, dan pengaruh perubahan preferensi terhadap konsumsi tanpa memperhatikan apakah preferensi tersebut sebagaimana diungkapkan oleh pilihannya.

Sementara dalam penelitian ini, preferensi pemilih terhadap karakter pemimpin merupakan subjek yang belum diamati sehingga belum diketahui apakah preferensi pemilih adalah sebagaimana yang diungkapkan oleh pilihannya. Penelitian ini sekaligus melakukan pengujian terhadap rasionalitas pemilih yang dilakukan dengan uji asumsi transitif dengan menerapkan aksioma lemah preferensi terungkap atau *weak axiom of revealed preference* (WARP) yang dikemukakan oleh Samuelson (1948) dan aksioma kuat preferensi terungkap atau *strong axiom of revealed preference* (SARP) yang dikemukakan oleh Houthakker (1950). Meskipun teori lain banyak membahas metode pengujian rasionalitas, namun penelitian ini adalah satu-satunya yang membahas preferensi dalam pemilihan umum dengan menerapkan langkah-langkah sebagaimana properti pengujian rasionalitas dengan mengutamakan terpenuhinya asumsi transitif melalui aksioma WARP dan SARP. Pengujian dilakukan melalui observasi kepada seluruh pemilih dan melepaskan banyak observasi yang tidak memenuhi asumsi.

B. Masalah Penelitian

Preferensi masyarakat dalam pemilihan umum diungkapkan oleh permintaan yang diwujudkan dalam pilihan pada salah satu kandidat. Pemilih tidak memiliki informasi dan pengetahuan yang cukup tentang karakter kandidat, namun mereka memiliki preferensi terhadap karakter pemimpin yang lebih disukai. Keputusan pemilih dibuat berdasarkan preferensi dan persepsi tentang kandidat. Persepsi dibangun melalui media informasi dan jajak pendapat yang dilakukan oleh lembaga survey yang dibayar untuk kepentingan kandidat.

Akibatnya kredibilitas informasi tersebut diragukan kebenarannya dan berpengaruh terhadap keputusan yang dibuat. Sementara preferensi merupakan salah satu karakter pemimpin yang lebih disukai dari beberapa karakter lain yang dapat dipilih. Sebagai makhluk rasional seharusnya pemilih dapat mengurutkan beberapa karakter mulai dari yang tidak disukai hingga yang lebih disukai dan membuat keputusan untuk memilih salah satu kandidat yang memiliki karakter sesuai dengan preferensinya. Namun dengan informasi dan pengetahuan yang terbatas ingin ditemukan apakah preferensi masyarakat memenuhi asumsi transitif dan apakah preferensi tersebut diungkapkan pada permintaan? Apabila preferensi pemilih diungkapkan pada permintaan maka dikatakan pemilih di Kota Padang rasional. Sebaliknya apabila preferensi pemilih tidak diungkapkan pada permintaan dikatakan pemilih tidak rasional.

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini ingin menguji rasionalitas preferensi yang diungkapkan melalui permintaan dengan tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah ;

1. Menganalisis karakteristik pemilih dan hubungannya dengan karakter pemimpin
2. Menganalisis karakteristik pemilih dan hubungannya dengan kandidat
3. Menganalisis karakter pemimpin dan hubungannya dengan kandidat
4. Menguji asumsi transitif untuk mendapatkan preferensi masyarakat Kota Padang
5. Mengevaluasi preferensi masyarakat dan hubungannya dengan permintaan kandidat

D. Manfaat Penelitian

Dengan menganalisis rasionalitas preferensi yang diungkapkan melalui permintaan, ada beberapa manfaat yang didapatkan dari penelitian yaitu;

1. Bagi politisi, sebagai informasi dalam memberikan masukan untuk menyusun strategi memperkuat karakter dan menjadi arah yang ingin dicapai dalam meningkatkan kualitas pribadi kandidat
2. Bagi pemerintah, sebagai informasi dalam memberikan masukan untuk

- menyusun kebijakan program pemerintah
3. Bagi swasta dapat menjadi dasar untuk menciptakan strategi pengembangan karakter individu
 4. Bagi peneliti dapat meningkatkan kemampuan dan kepekaan dalam menganalisis persoalan-persoalan masyarakat

E. Kebaruan Penelitian

Menggunakan teori ekonomi untuk menguji fenomena dalam pemilihan umum merupakan sebuah kajian menarik. Selama ini fenomena dalam pemilihan umum dianalisis dengan menggunakan ilmu politik. Namun dalam penelitian ini teori preferensi terungkap digunakan untuk menguji apakah preferensi masyarakat memenuhi asumsi transitif dan apakah preferensi tersebut diungkapkan pada permintaan. Untuk mendapatkan jawaban tersebut, dibuat asumsi yang membatasi penelitian agar tetap berada pada jalur teori yang digunakan.

Keuntungan menggunakan teori preferensi terungkap adalah bahwa observasi dilakukan kepada setiap individu yang terlibat dalam penelitian sehingga tidak ada satu pun individu yang luput dari pengamatan. Kecermatan diperlukan karena setiap observasi memiliki perilaku yang berubah-ubah sesuai dengan pilihan-pilihan yang diberikan. Pada akhirnya setelah melalui serangkaian tahap seleksi akan ditemukan observasi yang benar-benar mengungkapkan preferensi melalui pilihannya. Sedangkan tahapan seleksi tersebut dilakukan dengan menerapkan aksioma yang terdapat dalam teori preferensi terungkap. Penelitian ini bukan kajian baru, namun mengobservasi pilihan individu untuk mendapatkan preferensinya, merupakan kajian pertama yang dilakukan dalam pemilihan umum.

Penelitian ini dilakukan untuk mengatasi persoalan yang terjadi dalam pemilihan umum dimana informasi mengenai karakter kandidat merupakan barang pribadi yang hanya diketahui oleh kandidat. Kandidat tidak akan memberikan informasi pribadi apabila hal tersebut tidak menguntungkan baginya. Sementara dalam masa kampanye begitu banyak informasi yang beredar sehingga menutupi kebenaran sesungguhnya. Akibatnya masyarakat tidak memiliki pengetahuan lengkap tentang kandidat namun pilihan harus dibuat. Dengan keterbatasan informasi, dibuat keputusan dengan harapan pilihan yang dihasilkan

sebagaimana preferensi yang diinginkan. Karena itu penelitian ini dilakukan untuk menelusuri sejauh mana keputusan yang dibuat dalam situasi informasi tidak lengkap mampu menghasilkan sebuah pilihan yang sesuai dengan keinginan.

F. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian difokuskan pada pemilih yang berada pada tiga kelurahan di Kota Padang sebanyak 375 responden. Pertimbangan memilih tiga kelurahan karena jumlah selisih perolehan suara pada lokasi tersebut berimbang sehingga mudah mendapatkan responden yang diharapkan. Karakter yang diobservasi terdiri dari delapan belas karakter. Setelah diobservasi terdapat empat karakter yang paling dominan yaitu karakter cerdas, merakyat, jujur, dan tegas. Selanjutnya kepada keempat karakter tersebut dilakukan pengolahan data dengan menerapkan aksioma WARP dan melakukan pegujian untuk memenuhi asumsi transitif. Apabila pilihan responden konsisten, maka asumsi transitif terpenuhi. Berikutnya adalah mengamati preferensi pemilih apakah sebagaimana yang diungkapkan oleh permintaannya. Analisis ini dilakukan dengan menggunakan data faktual kandidat sehingga dapat disimpulkan apakah preferensi pemilih adalah sebagaimana yang diungkapkan oleh permintaannya.

